



Anggaran Pengamanan Pilkada di Bali Rp 22 Miliar

Denpasar (Bali Post) -

Polda Bali dan jajarannya telah melakukan berbagai persiapan pengamanan terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di enam kabupaten/kota pada 9 Desember mendatang. Anggaran untuk pengamanan pilkada serentak tersebut telah diketok palu DPRD kabupaten/kota. Dari Rp 26.134.745.008 yang diajukan, disetujui Rp 22.072.716.632. Selanjutnya, dana tersebut akan dikelola masing-masing polres.

"Polda Bali tidak kelola dana. Karena pengamanan pilkada dilakukan masing-masing polres. Jika ada bantuan personel dari polda, yang dipakai dana itu juga," kata Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Hery Wiranto Rabu (5/8) kemarin.

Adapun rincian jatah anggaran pengamanan tersebut, untuk Polresta Denpasar digelontor Rp 3.034.890.000 untuk pengamanan Kota Denpasar dan Rp 2.187.380.000 untuk pengamanan di wilayah Kuta dan Kuta Selatan. Sedangkan Polres Badung mendapat dana pengamanan Rp 2.5 miliar, Polres Tabanan Rp 3.069.985.000, Polres Bangli Rp 2.597.084.000, Polres Karangasem Rp 4.180.649.632, dan Polres Jembrana Rp 4.502.728.000.

"Dana tersebut tidak termasuk untuk kerusuhan. Jika terjadi kerusuhan akan dipakai dana khusus yaitu dana kontijensi dari Polda," ujarnya.

Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan latihan praoperasi, gelar pasukan, pengamanan kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan hasil, dan pelantikan. Terkait pengerahan personel, kata Hery, tiap tahapan jumlahnya berbeda. Saat kampanye dikerahkan 1.702 personel, masa tenang 1.600 personel, penghitungan suara 1.790 personel, penetapan 1.550 personel, dan pelantikan 1.759 personel. "Jumlah personel seluruhnya yang dilibatkan 12.764 orang, belum termasuk dari TNI, pecalang dan linmas," tegas Hery.

tegas Hery.

Menurut Kabid Humas, personel yang terlibat pengamanan pilkada sudah diberikan arahan mengenai cara bertindak, mulai tahapan pendaftaran calon kepala daerah, kampanye, masa tenang, pemungutan suara hingga pascapemungutan suara. Pola pengamanan sudah disusun dan tinggal dilaksanakan di lapangan.

Selain itu, Polda juga memetakan wilayah yang dianggap rawan. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Tabanan terindikasi rawan konflik. "Itu berdasarkan pengalaman sebelumnya. Kemungkinan di wilayah lain juga terjadi," tegas mantan Kabid

Edisi

: Kamis, 6 Agustus 2015

Hal

7

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali



Bali Post



sambungan -



SIMULASI - Sejumlah anggota kepolisian mengikuti simulasi teknis pelaksanaan pilkada, Rabu (5/8) kemarin di lapangan Lumintang, Denpasar. Simulasi dari pihak Polresta Denpasar ini dilakukan untuk melatih kesiapan anggota dalam pelaksanaan pilkada serentak bulan Desember mendatang.

Humas Polda Bengkulu ini.

Selama pengamanan pesta demokrasi, Polda di-back-up TNI dan Linmas. "Komposisinya bagaimana, masih koordinasi dengan TNI. Kalau personel Brimob juga diterjunkan dan jumlah kekuatan menyesuaikan dengan tingkat kerawanan wilayah," tegasnya.

awanan wilayah," tegasnya.

Ia mengimbau dan mengajak masyarakat Bali untuk menyukseskan pilkada serentak dan menjaga keamanan serta ketertiban. Apalagi Bali menjadi tujuan wisatawan dunia sehingga keamanan dijaga semaksimal mungkin. "Kalau pilkada serentak di Bali berlangsung aman dan lancar, kan bisa jadi contoh bagi provinsi lain. Keamanan Bali harus sama-sama kita jaga," ujar Hery. (kmb36)

Edisi

: Kamis, 6 Agustus 2015

Hal

7





APBD Perubahan Kota Denpasar

Demokrat Soroti Penurunan Rasio Belanja Langsung

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2015 Pemkot Denpasar sudah disetujui semua fraksi di DPRD setempat. Dari rancangan yang dibuat eksekutif, sejumlah pos anggaran menjadi sorotan fraksi. Salah satunya yakni penurunan rasio belanja langsung pada APBD Perubahan ini.

Juru bicara Fraksi Demokrat A.A. Alit Putra dalam sidang paripurna belum lama ini, menyoroti adanya penurunan rasio belanja langsung. Padahal di lihat dari belaja daerah, mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan APBD Induk. Pada APBD Induk pos belanja daerah ditetapkan Rp 1,76 triliun, menjadi Pa 2 triliun padi Pa jadi Rp 2 triliun pada APBD Perubahan.

Alit Putra mengatakan, rasio belanja tidak langsung pada APBD Induk sebesar 57,89 persen. Jumlah ini meningkat menjadi 58,35 persen pada APBD Perubahan. Sedangkan rasio untuk pos belanja langsung pada APBD Induk 42,11 persen, menjadi 41,65 persen pada APBD Perubahan. "Penurunan rasio belanja langsung dari tahun ke tahun ini perlu mendapat perhatian khusus, karena ini menyangkut pembangunan secara keseluruhan. Dampaknya pada pelayanan kepada masyarakat," ujar Alit Putra. Di sisi lain, belanja

pegawai dinilai cukup tinggi. Pada APBD Induk, belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp 830 miliar dan menjadi Rp 880 miliar pada APBD Perubahan. Tingginya anggaran pada pos belanja pegawai ini perlu mendapat perhatian, karena berpengaruh

terhadap pembangunan daerah. Sementara itu, Fraksi PDI-P dalam pandangan umumnya yang dibacakan A.A. Putu Gede Wibawa menyoroti langkah Disdikpora dalam melakukan rehab gedung sekolah. Fraksi terbesar di DPRD Denpasar ini berharap agar pemban-gunan gedung sekolah, baik SD, SMP, maupun SMA harus pula diikuti dengan penyediaan sarananya, seperti kursi dan bangku belajar sehingga bisa langsung dimanfaatkan oleh pihak sekolah

Fraksi ini juga mendorong Pemkot Denpasar untuk membangun sekolah baru, khususnya di tingkat SMP dan SMA. Hal ini dengan melihat jumlah lulusan setiap tahunnya terus mengalami peningkatakan. Akibatnya, banyak anak

sekolah yang tidak tertampung di sekolah negeri. "Kami mohon agar Pemkot Denpasar berkoordinasi dengan provinsi, terutama untuk pemanfaatan lahannya," ujar Gede Wibawa. (kmb12)

Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita

Edisi : Kamis, 6 Agustus 2015

: 2 Hal





Dewan Pertanyakan

Dana Hibah Tak Kunjung Cair

Bangli (Bali Post) -

Kalangan DPRD Bangli mempertanyakan dana hibah reses yang tak kunjung cair. Padahal sesuai mekanisme, untuk mencairkan dana itu sudah dilakukan MoU dengan Bupati sekitar dua bulan lalu. Seperti yang diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Nengah Sugiman, Rabu (5/8) kemarin. Dia mengatakan dari sekian hibah yang kini ditangani oleh beberapa SKPD, sebagian besar hibah yang telat pencairannya ditangani oleh Dinas PU Bangli.

Dia pun mempertanyakan kenapa dana hibah tersebut tidak kunjung cair hingga saat ini, padahal MoU-nya sudah ditandatangani beberapa bulan lalu. "Kami mempertanyakan apa sesungguhnya kendala sampai pencairan belum dilakukan. Padahal dana sudah ada dan tinggal menindaklan-

juti administrasi kelengkapannya," kata Sugiman.

Wakil rakyat asal Desa Manikliyu Kintamani ini mengatakan bila keterlambatan itu disebabkan karena faktor pendanaan, maka SKPD yang bersangkutan seharusnya bisa menyampaikan kendala itu ke dewan. "Kalau ada hambatanhambatan apapun dalam merealisasi hibah, agar disampaikan baik kepada Bupati maupun DPR. Sehingga jelas alasannya karena apa," imbuhnya. Apalagi sejauh ini, beberapa kegiatan yang didanai hibah sudah mulai dikerjakan masyarakat.

Bahkan tak sedikit kegiatan

tersebut ada yang hampir rampung. Pencairan dana hibah tersebut kata Sugiman sudah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Adanya perubahan sistem pencairan hibah yang sejak 2015 in ditangani oleh setiap SKPD yang membidangi, dinilai Sugiman belum menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Menurut Sugiman, dengan ditangani oleh setiap SKPD, seharusnya pencairannya hibah sekarang bisa dilakukan lebih cepat.

Dijelaskannya, pada tahun sebelumnya, keterlambatan

pencairan hibah banyak diakibatkan oleh administrasi yang membeludak di bulan Desember. Sehingga untuk mengantisipasi persoalan tersebut, pencairan hibah sudah mulai dirancang bulan April dan ditangani oleh SKPD terkait. Ini dimaksudkan agar pencairan hibah tidak melewati akhir tahun. Sementara itu atas lambatnya pencairan hibah saat ini dia pun meminta kinerja SKPD terkait lebih ditingkatkan lagi. Terlebih pencairan hibah melalui SKPD saat ini sudah menjadi komitmen pemerintah. (kmb40)

Edisi

: Kamis, 6 Agustus 2015

Hal

8





Kasus Dugaan Penyelewengan Pembagian PHR

Tak Datang, Mantan Kabiro Keuangan Pemprov Dipanggil Ulang

Denpasar (Bali Post) Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali yang sedang menangani kasus dugaan penyimpangan pembagian Pajak Hotel dan Restoran (PHR) untuk enam kabupaten di Bali, gagal memeriksa mantan Kepala Biro (Kabiro) Keuangan Pemprov Bali. Pasalnya, yang bersangkutan sedang berdinas keluar kota. "Ya, pemeriksaan tidak jadi karena yang bersangkutan ada dinas keluar kota. Karena tidak datang, mau diagendakan panggilan ulang," sebut Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan, Rabu (5/8) kemarin.

Sebelumnya, pihak Kejati Bali belum menemukan adanya perbutan melawan hukum (PMH) atas kasus dugaan pembagian PHR dari Badung dan Kota Denpasar keenam kabupaten lain di Bali. Atas kondisi itu, pihak penyidik terus mengembangkan penyelidikan. Walau sejumlah pejabat Pemprov Bali sudah diperiksa, namun itu masih terasa kurang sehingga sejumlah pejabat dan mantan pejabat di Pemprov Bali kembali diperiksa. Salah satunya, hantan pejabat pemprov yakni

mantan Kabiro Keuangan.

Sebelumnya, memang sejumlah pejabat sudah diperiksa, termasuk dari pihak bank. Misalnya, Direktur Utama (Dirut) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali I Made Sudja, Kamis (2/7) lalu. Pemanggilan tersebut untuk memastikan ada dana mengendap di BPD Bali dari kiriman hasil PHR Badung dan Denpasar. Pemanggilan Dirut BPD Bali dirasa sangat penting, karena berkenaan dengan dana bagi

hasil PHR tersebut dikirim melalui Bank BPD Bali. Pihak penyidik, tentu tidak langsung meminta informasi bank soal itu, namun melalui permohonan pemilik rekening yakni Pengprov Bali sebagai pihak penerima hasil PHR tersebut dan membagikannya kepada enam kabupaten di Bali.

Ditambahkannya, bahwa ingali pinak pengerima hasil pengerima

Ditambahkannya, bahwa informasi adanya selisih dan dana mengendap dalam rekening, terus didalami dan mulai terbuka. Dengan keterangan yang

disampaikan pihak BPD, ada halhal yang mendasar yang dapat ditarik pihak penyelidik. "Oleh karena itu, setelah diperiksa kami buatkan berita acaranya. Dengan demikian, data dan bahan keterangan yang didapat bisa kami jadikan kekuatan membuka dugaan atas kasus ini," jelas jaksa Made Tangkas.

Sementara itu, jaksa penyelidik Kejati Bali juga sudah merunut para sumber yang berkompeten untuk dimintai keterangannya. Pejabat dengan peran kunci sudah memenuhi pemeriksaan, yakni Kadispenda Badung Wayan Adi Arnawa dan Kadispenda Kota Denpasar Dewa Nyoman Semadi. Demikian juga mantan Kadispenda Bali Wayan Suarjana yang saat ini Sekwan DPRD Bali. Di tingkat kabag, juga telah diperiksa Kabag

Keuangan Bangli dan Tabanan. Selain itu, juga Kabag Keuangan Klungkung Gusti Ngurah Putra. Belasan sumber telah diperiksa dalam tahapan penyelidikan ini.

Dugaan penyimpangan PHR ini, bermula dari kicauan anggota DPRD Badung, Nyoman Sentana. Menurut Sentana, pembagian PHR Badung yang diberikan ke enam kabupaten di Bali tidak sesuai dengan peruntukannya. Bagibagi PHR itu yang sebenarnya untuk mendukung pariwisata, ternyata malah digunakan untuk keperluan lain. Pembagian yang diambil dari APBD Badung 2014

ini, karena tidak sesuai dengan peruntukannya, jelas merupakan penyimpangan. Hal itu juga tidak sesuai dengan surat kesepakatan bersama di luar perda, bahwa dana bagi hasil itu hanya untuk pariwisata. (kmb37)

Edisi : <u>vanis</u>, 6 Agustus 2015

Hal : <u>3</u>





Kasus Korupsi Pipanisasi di Karangasem

Terdakwa

Merasa Dibohongi Rekanan



Bali Post/wan

AIR MATA - Didampingi penasihat hukumnya, terdakwa Ida Bagus Made Oka mengusap air mata di wajahnya dengan tisu seusai mengikuti sidang dengan agenda pembelaan dalam sidang dugaan korupsi kasus pipanisasi di Kabupaten Karangasem. Keluarganya hadir mengikuti sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Renon, Rabu (5/8) kemarin.

PEMBELAAN cukup mengharukan disampaikan atas tuntutan dua tahun penjara yang dialamatkan pada Ir. I.B. Made Oka. Dalam pledoinya, terdakwa yang menjabat pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) itu mengaku bahwa dia sangat mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Dalam sidang Rabu (5/8) kemarin, di depan majelis hakim pimpinan Hasoloan Sianturi, terdakwa menjelaskan bahwa setelah ahli menyatakan pipa yang terpasang tidak sesuai dengan yang direncanakan, terdakwa merasa dibohongi dan sangat kecewa dengan rekanan. "Mengapa saya kecewa, karena sedikit pun tidak ada niat saya untuk merugikan negara," jelas terdakwa.

Pembelaan mulai mengharukan ketika I.B. Oka menyampaikan permohonan maaf pada sanak keluarganya. "Saya meminta maaf kepada istri, anak-anak dan saudara-saudara saya serta masyarakat Karangasem. Jika hal ini saya dianggap bersalah, dari lubuk hati saya mohon maaf. Ketahuilah, niat saya semata-mata untuk membantu masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan hidup," katanya.

Satu per satu anaknya dimintai maaf, karena kasus yang dialami membuat keluarganya terkoyak. Dia mengaku tidak bisa menemani anak sulungnya yang retina matanya robek berobat

ke RS. Dia tidak bisa mengantar anaknya mencari sekolah. Bahkan, dua anaknya mengundurkan diri dari kuliah di luar Bali karena keadaaan bapaknya itu. "Ajik (bapak - red) minta maaf, karena kasus yang Ajik alami. Kalian mengundurkan diri kuliah di Bandung," urainya.

Bandung," urainya.

Di akhir pembelaannya, dia berpesan pada anaknya, "Miskin harta bukan kemiskinan yang sesungguhnya, tetapi miskin pengabdian adalah miskin yang termiskin. Saya berkata demikian, karena saya sangat mendukung

upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dan saya menentang korupsi yang merugikan rakyat dan negara," sebut Oka.
Sebelumnya, Rabu (29/7), I.B.

Sebelumnya, Rabu (29/7), I.B. Made Oka, terdakwa kasus dugaan korupsi pipanisasi Karangasem dituntut hukuman selama dua tahun penjara oleh JPU Putu Gede Juliarsana. Jaksa di depan majelis hakim pimpinan Hasoloan Sianturi menyatakan terdakwa yang menjabat PPTK itu ber-

salah melakukan tindak pidana korupsi. Yakni, secara berlanjut telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, atau kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Atas perbuatannya itu, terdakwa dituntut hukuman penjara selama dua tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan. Di samping itu, terdakwa juga dikenakan denda Rp 50 juta subsidair 6 bulan kurungan. Jaksa dalam surat tuntutannya menjerat terdakwa dengan Pasal 3 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (kmb37)

Edisi : Kamis, 6 Agustus 2015

Hal : 3





Sidang Korupsi BBM Bersubsidi

Hakim Minta Pemilik SPBU dan Manajernya Dihadirkan

Denpasar (Bali Post) -

Lima orang saksi kembali dihadirkan dalam sidang dugaan korupsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan terdakwa Made Sueca Antara. Dari lima orang saksi itu, ada pegawai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), kepala desa dan juga mantan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Kadisperindagkop) Jembrana, Dra. Ni Made Ayu Ardini (vonis lepas dan masih tahap kasasi). Ayu Ardiani tidak banyak

Ayu Ardiani tidak banyak ditanya oleh majelis hakim pimpinan Acmad Peten Sili dengan hakim anggota Beslin Sihombing dan Miptahul. Wanita yang kemarin tampak kedinginan itu, hanya dicerca soal pemberian rekomendasi yang dijatuhkan perusahaan terdakwa, baik permintaan rekomendasi melalui telepon maupun dalam pertemuan.

Sidang kemarin, yang cukup membuat majelis hakim bersuara keras adalah dari kesaksian karyawan SPBU Penyaringan. Mereka dinilai plintat-plintut karena tidak konsisten dengan jawabannya. Salah satu pegawai SPBU itu adalah Ayu Purniati. Adanya keterangan yang dinilai tidak konsisten itu, membuat hakim kesal karena mekanisme pencairan BBM melalui rekomendasi tidak begitu tegas diketahuinya. Begitu juga sola izin atau surat-suratnya. "Apakah SPBU sudah digeledah? Apa saja buktinya?" tanya hakim.

Jaksa pun mengatakan ada barang buktinya. Namun, hakim belum puas dengan kondisi itu sehingga memerintahkan jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana itu untuk memanggil dan menghadirkan pemilik SPBU dan managernya, Ketut Suyanta di Pengadilan Tipikor Denpasar. "Manager-nya juga harus dijadikan saksi. Pemilik SPBU

juga dipanggil, jadikan dia saksi. Penting ini dihadirkan biar tahu juga karyawannya soal rekomendasi. Biar tidak seenaknya saja," pinta hakim Acmad Peten Sili.

Atas permintaan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suhadi mengaku akan memanggil manager dan owner SPBU itu dalam sidang pekan depan. "Kan ini perintah hakim. Ya, kita harus panggil pemilik dan manager-nya," sebut Suhadi usai persidangan.

Sementara kepala desa setempat, banyak mengaku tidak tahu atas kasus ini. Begitu juga ketika ditanya tentang perusahaan UD Sumber Maju. "Ini perusahaan apa? Kecil, menenangah, UKM atau apa?" tanya hakim. Sang kades tak mampu menjawab karena tidak tahu. "Sepertinya sama," jawab kades. Hakim pun lantas menyahuti, "Kalau tidak bisa, ya bilang tidak bisa." (kmb37)

Edisi : Kamis, 6 Agustus 7015

Hal : 3